

**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : SP DIPA- 135.11.2.693125/2026**

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026

Revisi ke 01
Tanggal : 27 Desember 2025

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

- 1. Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
- 2. Unit Organisasi : (11) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
- 3. Provinsi : (34) SULAWESI BARAT
- 4. Kode>Nama Satker : (693125) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI BARAT
- Sebesar : Rp. 564.322.000 (LIMA RATUS ENAM PULUH EMPAT JUTA TIGA RATUS DUA PULUH DUA RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

- 03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN
- 03.03 PEMBINAAN HUKUM

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

Jumlah Uang

Terlampir

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	564.322.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNB	Rp.		- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
- PNB TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
			5. Hibah Langsung	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

- 1. KPPN MAMUJU (178) Rp. 564.322.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

- 1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
- 2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
- 3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
- 4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
- 5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- 6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
- 7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026.

Jakarta, 01 Desember 2025
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

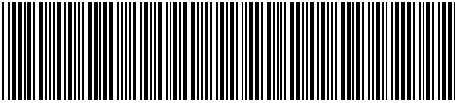
ttd.
LUKY ALFIRMAN
NIP. 197003271995031002

LAMPIRAN

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISI AN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2026

NOMOR : DIPA- 135.11.2.693125/2026

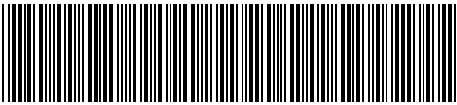


DS:5903-9268-1509-0171

Satker : (693125) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI BARAT

BB	Program Pembentukan Regulasi	Rp.	25.090.000
BB.7133	Penyelenggaraan Pembangunan Hukum Nasional dan Analisis dan Evaluasi Hukum di Wilayah	Rp.	25.090.000
BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp.	539.232.000
BF.7136	Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah	Rp.	539.232.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.11.2.693125/2026
I A. INFORMASI KINERJA



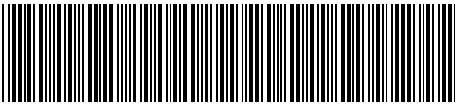
DS:5903-9268-1509-0171

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (11) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
Provinsi : (34) SULAWESI BARAT
Kode>Nama Satker : (693125) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI BARAT

Halaman : I A. 1

Program	:	135.11.BB	Program Pembentukan Regulasi				25.090.000	
Kegiatan	:	7133	Penyelenggaraan Pembangunan Hukum Nasional dan Analisis dan Evaluasi Hukum di Wilayah				25.090.000	
Indikator Kinerja Kegiatan	:							
Klasifikasi Rincian Output	1	:	7133.ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM		1,00	Rekomendasi Kebijakan	25.090.000
Rincian Output	:	01	ABD.001	Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Hukum di Daerah		1.00	Rekomendasi Kebijakan	25.090.000
Program	:	135.11.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum				539.232.000	
Kegiatan	:	7136	Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah				539.232.000	
Indikator Kinerja Kegiatan	:							
Klasifikasi Rincian Output	1	:	7136.BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga		7,00	Lembaga	28.272.000
Rincian Output	:	01	BDB.001	Pengelolaan anggota JDIHN di wilayah		7.00	Lembaga	28.272.000
Klasifikasi Rincian Output	2	:	7136.BDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat		300,00	Orang	31.988.000
Rincian Output	:	01	BDC.001	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat melalui Penyuluhan Hukum di Daerah		300.00	Orang	31.988.000
Klasifikasi Rincian Output	3	:	7136.BIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga		6,00	Lembaga	29.812.000
Rincian Output	:	01	BIC.001	Pengawasan Pelaksanaan Bantuan Hukum di Daerah		6.00	Lembaga	29.812.000
Klasifikasi Rincian Output	4	:	7136.BMA	Data dan Informasi Publik		1,00	dokumen, Peta, Data	22.355.000
Rincian Output	:	01	BMA.001	Inventarisasi Permasalahan Hukum di Wilayah		1.00	Data	22.355.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.11.2.693125/2026
I A. INFORMASI KINERJA



DS:5903-9268-1509-0171

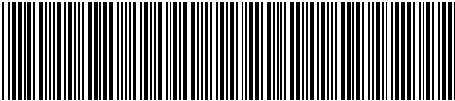
Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (11) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
Provinsi : (34) SULAWESI BARAT
Kode>Nama Satker : (693125) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI BARAT

Klasifikasi Rincian Output	5	:	7136.QBA	Layanan Bantuan Hukum Perseorangan		50,00	Orang	320.000.000
Rincian Output		:	01	QBA.U01	Kegiatan Bantuan Hukum Litigasi (PN)	50.00	Orang	320.000.000
Klasifikasi Rincian Output	6	:	7136.QBC	Layanan Bantuan Hukum Kelompok Masyarakat		6,00	Kelompok Masyarakat	51.216.000
Rincian Output		:	01	QBC.U01	Kegiatan Bantuan Hukum Non Litigasi (PN)	6.00	Kelompok Masyarakat	51.216.000
Klasifikasi Rincian Output	7	:	7136.QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga		1,00	Lembaga	55.589.000
Rincian Output		:	01	QDB.001	Layanan Pendampingan Pembentukan Pos Bantuan Hukum Desa/Kelurahan (PN)	1.00	Lembaga	55.589.000

Jakarta, 01 Desember 2025
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

ttd.
MIN USIHEN
NIP. 196903091994032001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.11.2.693125/2026
I B. SUMBER DANA



DS:5903-9268-1509-0171

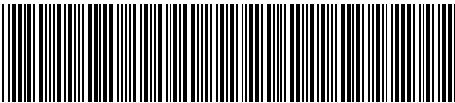
Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (11) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
Provinsi : (34) SULAWESI BARAT
Kode>Nama Satker : (693125) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI BARAT

						Pagu	Ekuivalen Rupiah	
1. Anggaran Tahun 2026	Rp.	564.322.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
1. Rupiah Murni	Rp.	564.322.000		(2) RPLN	US\$	0	Rp.	0
2. PNPB	Rp.			b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN	US\$	0	Rp.	0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR	0		
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR	0		
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR	0		
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR	0		

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.11.2.693125/2026
II. RINCIAN PENGELUARAN



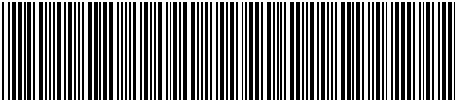
DS:5903-9268-1509-0171

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (11) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
Provinsi : (34) SULAWESI BARAT
Kode>Nama Satker : (693125) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI BARAT
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
693125	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI BARAT	-	564.322	-	-	-	564.322	34 . 51	
135.11.BB	Program Pembentukan Regulasi	-	25.090	-	-	-	25.090		
7133	Penyelenggaraan Pembangunan Hukum Nasional dan Analisis dan Evaluasi Hukum di Wilayah	-	25.090	-	-	-	25.090		
7133.ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM (34.51 SULAWESI BARAT / MAMUJU)	-	25.090	-	-	-	25.090		
01 RM		-	25.090	-	-	-	25.090		
135.11.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	-	539.232	-	-	-	539.232		
7136	Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah	-	539.232	-	-	-	539.232		
7136.BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga (34.51 SULAWESI BARAT / MAMUJU)	-	28.272	-	-	-	28.272		
01 RM		-	28.272	-	-	-	28.272		
7136.BDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat (34.51 SULAWESI BARAT / MAMUJU)	-	31.988	-	-	-	31.988		

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.11.2.693125/2026
II. RINCIAN PENGELUARAN



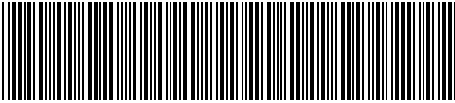
DS:5903-9268-1509-0171

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (11) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
Provinsi : (34) SULAWESI BARAT
Kode>Nama Satker : (693125) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI BARAT
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 2
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01 RM		-	31.988	-	-	-	31.988	178	
7136.BIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga (34.51 SULAWESI BARAT / MAMUJU)	-	29.812	-	-	-	29.812	34 . 51	
01 RM		-	29.812	-	-	-	29.812	178	
7136.BMA	Data dan Informasi Publik (34.51 SULAWESI BARAT / MAMUJU)	-	22.355	-	-	-	22.355	34 . 51	
01 RM		-	22.355	-	-	-	22.355	178	
7136.QBA	Layanan Bantuan Hukum Perseorangan (34.51 SULAWESI BARAT / MAMUJU)	-	320.000	-	-	-	320.000	34 . 51	
01 RM		-	320.000	-	-	-	320.000	178	
7136.QBC	Layanan Bantuan Hukum Kelompok Masyarakat (34.51 SULAWESI BARAT / MAMUJU)	-	51.216	-	-	-	51.216	34 . 51	
01 RM		-	51.216	-	-	-	51.216	178	

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.11.2.693125/2026
II. RINCIAN PENGELUARAN



DS:5903-9268-1509-0171

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (11) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
Provinsi : (34) SULAWESI BARAT
Kode>Nama Satker : (693125) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI BARAT
Kewenangan : (KD)

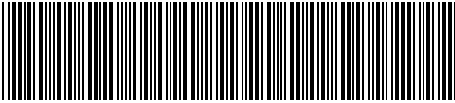
Halaman : II. 3
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7136.QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga (34.51 SULAWESI BARAT / MAMUJU)	-	55.589	-	-	-	55.589	34 . 51	
	01 RM	-	55.589	-	-	-	55.589	178	
JUMLAH		-	564.322	-	-	-	564.322		

Jakarta, 01 Desember 2025
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

ttd.
MIN USIHEN
NIP. 196903091994032001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.11.2.693125/2026
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN



DS:5903-9268-1509-0171

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (11) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
Provinsi : (34) SULAWESI BARAT
Kode/Nama Satker : (693125) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI BARAT

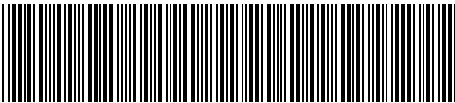
Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	693125	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI BARAT													
		RENCANA PENARIKAN DANA	0	0	58.983	56.571	56.371	97.483	66.072	45.678	70.079	56.545	56.540	0	564.322
	135.11.BB.7133	BELANJA BARANG	0	0	58.983	56.571	56.371	97.483	66.072	45.678	70.079	56.545	56.540	0	564.322
		Penyelenggaraan Pembangunan Hukum Nasional dan Analisis dan Evaluasi Hukum di Wilayah	0	0	3.253	0	2.772	4.008	3.149	2.479	3.146	3.144	3.139	0	25.090
	135.11.BF.7136	52 BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	3.253	0	2.772	4.008	3.149	2.479	3.146	3.144	3.139	0	25.090
		Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah	0	0	55.730	56.571	53.599	93.475	62.923	43.199	66.933	53.401	53.401	0	539.232
		52 BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	55.730	56.571	53.599	93.475	62.923	43.199	66.933	53.401	53.401	0	539.232

Jakarta, 01 Desember 2025
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

ttd.
MIN USIHEN
NIP. 196903091994032001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.11.2.693125/2026
IV A. B L O K I R



DS:5903-9268-1509-0171

Kementerian Negara/Lembaga : [135] KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : [11] BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
Provinsi : [34] SULAWESI BARAT
Kode dan Nama Satker : [693125] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI BARAT

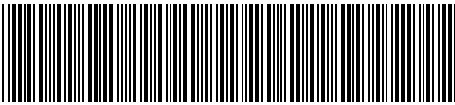
Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 01 Desember 2025
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

ttd.
MIN USIHEN
NIP. 196903091994032001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.11.2.693125/2026
IV B. C A T A T A N



DS:5903-9268-1509-0171

Kementerian Negara/Lembaga : [135] KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : [11] BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
Provinsi : [34] SULAWESI BARAT
Kode dan Nama Satker : [693125] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI BARAT

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 01 Desember 2025
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

ttd.
MIN USIHEN
NIP. 196903091994032001